

Judul : Tim mirroring tak lain hanya vendor
Tanggal : Selasa, 27 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

Tim Mirroring Tak Lain Hanya Vendor

Pembenahan di segala lini terhadap sektor pendidikan nasional untuk mengatasi ketertinggalan mutlak dilaksanakan. Yang juga diperlukan ialah perihal transparansi dan akuntabilitas.

FAUSTINUS NUA
faustinus@medialindonesia.com

RAPAT kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Komisi X DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin diwarnai koreksi kritis atas kebijakan pemerintah selama ini. Yang juga banyak disorot ialah keberadaan 400 tim *mirroring* yang dibanggakan Mendikbudristek Nadiem Makarim di forum pendidikan PBB ternyata hanya vendor aplikasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nadiem Makarim mendapat apresiasi dari negara-negara anggota PBB saat memaparkan kebijakan transformasi digital di sektor pendidikan Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai inovatif.

Meski demikian, anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menyebut bahwa pujian seperti itu belum didapat Nadiem

dari masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu sangat miris dan perlu dipertanyakan kinerja Nadiem yang benar-benar dirasakan masyarakat Indonesia sejauh ini.

“Saudara Menteri boleh bangga mendapatkan tepuk tangan di PBB, tapi Saudara Menteri belum mendapatkan tepuk tangan dari masyarakat Indonesia di dunia pendidikan. Ini kan juga miris,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, kebijakan Nadiem sering kali mendapat penolakan dari para *stakeholder* pendidikan. Sebut saja RUU Sisdiknas yang hingga saat ini sangat kencang ditolak berbagai organisasi pendidikan. Begitu pula dengan adanya 400 anggota tim bayangan yang disebut-sebut memiliki kewenangan selevel dirjen.

Hal senada dikemukakan Abdul Fikri Faqih terkait keberadaan tim yang beranggotakan 400 orang dan dinilai tidak transparan.

“Di birokrasi kan seperti itu. Bukan hanya orang pertemuan, penting atau tidak fungsinya, tapi ini ada izinnya atau tidak. Pandangan birokrasi selalu seperti itu,” tegasnya.

Anggota Komisi X DPR tersebut mengusulkan bila keberadaan tim yang mendukung pengembangan teknologi itu benar-benar penting, kementerian bisa merevisi Permendikbudristek. Atau lewat perpres, payung hukum bisa diperkuat, sehingga transformasi digital pendidikan yang tengah didorong kementerian tidak menyimpang dari regulasi.

“Supaya vendor-vendor ini legal juga, ketika memproduksi sesuatu dan memberikan saran, itu menjadi legal,” tandasnya.

Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat juga menambahkan upaya akselerasi pembangunan pendidikan membutuhkan transparansi atas proses yang dilaluinya. Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap Mendikbudristek bisa menyosialisasikan tugas dan fungsi tim khusus tersebut kepada para pemangku kepentingan agar terjadi pemahaman yang sama terhadap upaya yang dilakukan. Alasannya, upaya mengak-

selerasi pembangunan sektor pendidikan butuh dukungan semua pihak.

Koreksi

Saat menjawab berbagai kritikan dan masukan dari Komisi X DPR tersebut, Nadiem mengakui bahwa dirinya salah menggunakan istilah *shadow organization* saat melakukan presentasi di PBB beberapa waktu lalu. Organisasi bayangan yang disebutnya memiliki anggota hingga 400 orang itu ternyata adalah mitra atau vendor yang bekerja sama dengan kementerian yang bertugas mendorong dan mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi. Mereka merupakan vendor di bawah anak perusahaan PT Telkom, yakni PT Menara Multimedia.

Mereka bekerja berdasarkan kontrak atau sesuai tender yang didapat dari Kemendikbudristek. Berdasarkan paparan lpsse.kemendikbud.go.id, proyek pada jasa konsultan platform guru pembelajaran nilai kontraknya Rp27,3 miliar. Adapun untuk proyek jasa konsultan platform pengembangan guru profil dan pengembangan kompetensi, anggaran yang harus dikeluarkan Kemendikbudristek senilai Rp17,187 miliar. (*/Iam/H-1)